

**PROSPEK SEKTOR PERBANKAN INDONESIA: BEBERAPA AGENDA
PENTING**

Nopirin

Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

Globalization and the development of information technology has led to changes in the world financial system into an integrated market. The implication of this phenomenon is that the competition is getting fiercer. The restructuring of Indonesian banking is necessary in order to increase efficiency. The direction of banking activities toward electronic banking. The dominance of private banking is bigger and bigger. Merger is likely to happen. Credit allocation need to be scrutinized and directed more on productive activities not for consumptive purposes. Prudential credit policies should be taken in order to reduce bad loans. The banking sector should be sound. Another aspect for improving banking activities is monitoring by Bank Indonesia. Through improving staf quality and using information technology monitoring and evaluation could be conducted efficiently. Last but not least is the human resource development through education and training. Well trained staff, able to utilized high technology together with high moral, ethic and have futuristic perspective is necessary condition for sound banking.

GLOBALISASI

Perkembangan teknologi informasi serta semakin terbukanya perdagangan dunia tentu akan sangat mempengaruhi perkembangan dunia termasuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi & perbankan di tanah air. Era abad 21 merupakan era dunia tanpa batas (*Borderless World*), lalu lintas barang, jasa, uang dan modal antara satu negara dengan negara lain semakin bebas. Era demikian ini sering dinamakan globalisasi (kesejagadan).

Era globalisasi (kesejagadan) ditandai dengan semakin menyatunya negara-negara di dunia sehingga batas-batas negara dalam arti ekonomi, keuangan, investasi; sumber daya dan informasi semakin kabur.

Kecenderungan yang demikian ini ditimbulkan oleh adanya:

1. Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan dikembangkannya internet, CD ROM, komunikasi satelit, maka informasi dapat pindah dari satu tempat (negara) ke tempat (negara lain) dalam sekejap. Informasi dapat pindah cepat melalui *information super highway*" yang dapat merubah pola bisnis dunia. Dengan *"digital cash"* uang dapat ditransfer dengan cepat melalui telephone dan satelit. Satu perusahaan yang ingin menjangkau pasar luar negeri tidak harus mengalihkan seluruh usahanya di luar negeri. Penentuan *design* dan pengendalian mutu dapat dilakukan di negara induk dengan menggunakan satelit dan uang dikirim melalui *electronic transfer*.

Implikasi dari kemajuan ini bahwa dikemudian hari barang dan jasa yang paling berharga adalah yang padat otak (IQ intensive). Produk ini sulit dideteksi oleh Kantor Bea Cukai karena dapat ditransfer melalui alat elektronik langsung kepada penerima.

Dalam kondisi yang demikian ini maka setiap negara akan selalu berupaya untuk terus mencari identitas/keunggulannya untuk dapat bersaing. Deregulasi dan spesialisasi akan banyak dilakukan. Peranan Pemerintah akan semakin kecil dan cenderung akan meningkatkan investasi di bidang pendidikan.

2. Liberalisasi perdagangan

Ide dasar liberalisasi perdagangan sudah ada sejak abad 17, berasal dari ekonomi Klasik (Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill dan sebagainya). Dasar pemikiran mereka adalah dengan spesialisasi (yang arah spesialisasinya pada usaha yang memiliki keunggulan) dan perdagangan bebas maka kesejahteraan negara (dunia) akan meningkat. *"Trade is an engine of growth"* kata mereka.

Usaha-usaha ke arah perdagangan bebas dijalankan mulai tahun 1947 pada pertemuan dunia pertama di Jenewa yang dicetuskan pembentukan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yakni suatu forum/perundingan untuk

pengurangan hambatan-hambatan perdagangan. Selama ini perundingan-perundingan (sering disebut sebagai putaran karena tempatnya berpindah-pindah) telah dilakukan berkali-kali diantaranya di Uruguay tahun 1986 yang disetujui perdagangan bebas tidak hanya di bidang barang tetapi juga jasa. Selanjutnya forum GATT ini dalam perundingan di Marrakesh (Maroko) tanggal 14 April 1994 diganti dengan WTO (*World Trade Organization*) yang akan berlaku nanti tahun 2020.

Keterlibatan Indonesia dalam era globalisasi ekonomi yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan dan investasi tidak bisa dihindari. Suka tidak suka mau tidak mau, siap tidak siap harus kita hadapi. Untuk itu negara-negara ASEAN (termasuk Indonesia) telah melakukan kerjasama AFTA bahkan dengan negara Asia-Pasifik lainnya menjalin kerjasama ekonomi (APEC). Semuanya ini merupakan langkah menuju ke arah globalisasi ekonomi 2020.

Kerjasama AFTA bahkan dipercepat pelaksanaannya dari tahun 2008 menjadi 2003. Kerjasama ekonomi ini merupakan latihan dalam menghadapi APEC dan juga nantinya globalisasi 2020. Beberapa langkah telah diambil dalam rangka AFTA ini, antara lain perluasan cakupan kerjasama/misalnya sektor pertanian telah dimasukkan/serta kerjasama segitiga pertumbuhan (SIJORI, MT-GT, dan sebagainya). Diharapkan efisiensi dapat meningkat guna menghadapi persaingan yang lebih luas.

Kerjasama APEC dimulai dengan pembicaraan antar menteri ekonomi Asia-Pasifik di Australia tahun 1989 sampai tahun 1992. Pada tahun 1993 Presiden Bill Clinton (USA) mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Blake Island (USA) dan menghasilkan satu komitmen anggota APEC untuk mendukung keberhasilan Putaran Uruguay (GATT) tentang perdagangan bebas. Hasil pertemuan ini adalah visi ke depan tentang perdagangan bebas. Pertemuan selanjutnya dilakukan di Bogor (Indonesia) tahun 1994 yang menghasilkan satu Deklarasi yakni tekad bersama untuk meletakkan landasan tercapainya visi tersebut di atas. Sasaran jangka panjang yang ingin dicapai adalah liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik. Tindak lanjut dari hasil ini kemudian dirumuskan dalam pertemuan di Osaka (Jepang) yang berupa Agenda Aksi yakni langkah-langkah kongkrit. Prinsip-prinsip yang disetujui APEC

meliputi peningkatan kerjasama ekonomi dalam bidang perdagangan dan investasi, agar tercapai sistem perdagangan yang terbuka.

Sebagai kelanjutan dari Putaran Uruguay pada tanggal 14 April 1994 diadakan pertemuan di Marrakesh (Maroko) dan dibentuklah *World Trade Organization* (WTO) sebagai ganti *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT). Prinsip-prinsip Deklarasi Marrakesh meliputi:

1. *Cross boarder* artinya eksportir/produsen bebas masuk ke satu negara.
2. *Consumption abroad*; setiap orang atau konsumen bebas membeli barang dan jasa termasuk dari luar negeri (impor)
3. *Commercial presence*; setiap orang bebas mendirikan pabrik, kantor atau perwakilan di negara lain.
4. *Presence of natural person*; setiap orang bebas untuk berusaha di negara lain.
5. *Most favoured nation*; yakni tidak ada perlakuan yang berbeda terhadap negara lain.
6. *National treatment*; perlakuan produsen luar negeri sama dengan produsen dalam negeri.

Dengan prinsip-prinsip di atas maka batas-batas negara (dalam arti ekonomi) tidak ada lagi. Barang dan jasa dapat bebas ke luar-masuk satu negara. Ditunjang dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dunia seolah-olah tanpa batas. Inilah yang sering diartikan dengan era globalisasi (era kesejagadan). Karena Indonesia telah ikut meratifikasi kesepakatan WTO tersebut, maka kita tidak bisa menghindar lagi dari pelaksanaan prinsip-prinsip di atas. Pertanyaannya: Siapkah sektor perbankan kita menghadapi era yang demikian itu?. Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita tengok implikasi teoritisnya kemudian perbankan kinerja perkembangan Indonesia hingga saat ini.

KINERJA PERBANKAN DI INDONESIA

Sistem keuangan Indonesia semasa sebelum deregulasi didominasi oleh perbankan, dimana Bank Pemerintah menguasai $\pm 90\%$ dari asset perbankan. Dominasi ini terutama dikarenakan akses kepada Bank Indonesia dan perusahaan negara serta jaringan yang lebih besar.

Peranan Bank Swasta relatif sangat kecil karena tidak/belum mempunyai akses seperti halnya Bank Pemerintah. Lembaga perusahaan keuangan non Bank (seperti Asuransi dan Dana pensiun) masih kecil sekali.

Kenaikan harga minyak, di satu sisi merupakan penerimaan negara, tetapi di sisi lain telah menimbulkan alokasi dana yang tidak efisien. Kredit likuiditas yang melimpah pada masa itu dilihat dari sisi sasaran Pemerintah untuk mencapai efisiensi di sektor moneter kurang tercapai. Kredit likuiditas adalah kredit yang disubsidi bunganya dan targetnya tertentu yakni untuk mengembangkan program prioritas seperti pengembangan usaha menengah dan kecil. Dengan demikian dapat terjadi alokasi dana yang kurang efisien yakni terarah pada program yang returnnya cenderung rendah. Alokasi yang sudah diarahkan ke target tertentu (dengan demikian tidak mendasarkan pada sistem pasar) secara teoritis tidak akan optimal. Efisiensi alokasinya tidak efisien, *marginal efficiency of investment* tidak sama antar sektor yang dibiayai.

Kondisi di atas mencerminkan adanya financial repression serta sistem yang fragmented. Alokasi kredit serta tingkat bunga yang diatur serta dominasi Bank Pemerintah merupakan indikator adanya financial repression. Kondisi yang demikian ini mengakibatkan efisiensi di sektor moneter tidak tinggi.

Setelah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat pada tahun 1970-an, perekonomian Indonesia mendapat pukulan yang berat dari resesi ekonomi dunia serta turunnya harga minyak di pasaran internasional. Keadaan ini memaksa Pemerintah Indonesia mengambil berbagai kebijakan penyesuaian ekonomi makro dalam negeri karena peranan migas dalam perekonomian nasional cukup besar. Pada akhir tahun 1970-an ekspor minyak merupakan $\pm 82\%$ dari total ekspor dan $\pm 72\%$ penerimaan negara berasal dari migas.

Berbagai kebijakan penyesuaian telah dilakukan. Diawali dengan penyesuaian kurs valuta asing (devaluasi tahun 1978), penjadualan beberapa proyek kemudian diikuti dengan deregulasi. Dimulai dengan deregulasi di sektor moneter - perbankan 1 Juni 1983 yang isinya memberikan fleksibilitas kepada perbankan berupa penghapusan pagu kredit, pembebasan penentuan tingkat bunga dan pengurangan kredit likuiditas. Sasaran yang dituju adalah meningkatkan efisiensi serta

kemandirian perbankan. Deregulasi perbankan tersebut kemudian diikuti oleh deregulasi lain, yakni di bidang perdagangan serta investasi.

Di bidang perdagangan berupa pergeseran dari non tarif menjadi tarif, penyederhanaan tarif serta upaya memperlancar arus lalu lintas barang. Proses investasi dari luar negeri disederhanakan serta PMA boleh melakukan investasi dengan modal 100%, terutama untuk produk ekspor.

Pada tahun 1988 deregulasi moneter perbankan tersebut di atas dilanjutkan dengan yang lebih luas lagi dengan mengurangi barrier to entry dalam industri perbankan. Perkembangan sektor moneter cukup pesat. Ketegaran di sektor riil menimbulkan ekonomi kepanasan serta masalah-masalah lain di antaranya kualitas portfolio perbankan menurun dan sumber daya manusia. Pemerintah kemudian mengambil kebijakan yang sifatnya hati-hati (*prudential policies*) serta deregulasi lanjutan terutama di sektor riil.

Dari serangkaian kebijakan deregulasi tersebut perkembangan sektor moneter cukup tinggi serta terjadi perubahan/pergeseran struktur ekonomi Indonesia.

Perkembangan yang pesat dari sektor moneter tersebut dapat diamati dari perkembangan assets, jumlah bank, dana yang dihimpun serta dana yang disalurkan. Semenjak tahun 1987 pertumbuhan rata-rata per tahun untuk assets 29-20%, deposito dan tabungan sebesar 31,46% dan kredit sebesar 31,40%. Angka pertumbuhan tersebut cukup tinggi, apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan di dunia perbankan yang dianggap aman yakni 20%. Dilihat dari jumlah bank, perkembangan yang sangat pesat terjadi pada bank swasta nasional. Pada tahun 1986 jumlah bank (termasuk BPR) sebanyak 5902, meningkat menjadi 8993 pada tahun 1996. Perbankan dewasa masih menghadapi masalah ekonomi yang mudah memanas, dan yang lebih penting adalah kredit bermasalah.

Struktur ekonomi Indonesia juga telah mengalami perubahan. Peranan minyak mengalami penurunan dalam GDP yakni dari 17% pada tahun 1970 menjadi \pm 9% pada tahun 1994. Nilai ekspor yang berasal dari minyak turun dari 82% menjadi \pm 38%. Penerimaan negara dari minyak juga mengalami penurunan dari 70% menjadi \pm 40%. Dengan demikian ekonomi Indonesia dapat dikatakan telah bergeser dari ekonomi minyak menjadi bukan minyak.

Cukup melegakan melihat perkembangan di atas. Namun satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah dengan semakin terintegrasinya ekonomi Indonesia dengan ekonomi dunia kebijakan moneter dituntut kehati-hatian yang tinggi.

Peranan pemerintah semakin kecil di bidang moneter, deregulasi dan globalisasi tersebut akan merubah struktur serta pola perbankan Indonesia. Dengan deregulasi yang berlanjut telah membuka peluang munculnya beberapa alternatif pembiayaan, seperti pasar modal, factoring, leasing, modal ventura serta beberapa jenis sekuritas.

Pasar modal di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Jumlah perusahaan yang go public meningkat dari 24 pada tahun 1985 menjadi 239 pada tahun 1996. Demikian juga nilai transaksi naik dari Rp 3 miliar menjadi Rp 32 trilyun.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuahkan beberapa produk financial baru seperti digital cash transfer (electronic money). Kemajuan teknologi juga telah membawa dampak semakin banyaknya transaksi uang antar negara serta pembukaan cabang bank di luar negeri. Semuanya ini menyebabkan sektor moneter akan semakin terintegrasi, batas-batas negara menjadi kabur. Ditunjang dengan pelaksanaan prinsip-prinsip WTO pada tahun 2020 nantinya persaingan perbankan semakin tajam.

Bank-bank asing akan semakin banyak bermunculan di Indonesia. Konsumen jasa perbankanpun akan menuntut jasa yang semakin canggih. Untuk menghadapi keadaan tersebut perbankan harus betul-betul menyiapkan tenaga yang mempunyai etika dan visi ke depan. Disamping itu, dituntut pula penggunaan teknologi baru dan tak ketinggalan melaksanakan restrukturisasi.

GEJOLAK NILAI RUPIAH

Sebelum masuk ke pembicaraan dampak depresiasi rupiah terhadap perekonomian Indonesia, terlebih dahulu dimulai dari awal terjadinya fenomena tersebut. Kejadian ini berawal di Thailand akhir Juni lalu. Pada saat itu ekonomi mereka agak kacau, dalam arti fundamental ekonominya seperti: defisit transaksi berjalan membengkak sampai 8,5% (dari Produk Domestik Bruto/PDB) Untuk

mengatasi hal itu, mereka mengupayakan *capital inflow* agar banyak dana masuk, kurs mata uangnya harus tetap.

Melihat defisit transaksi berjalan itu, lalu diduga muncullah spekulasi. Para spekulasi itu membuat perkiraan-perkiraan apa yang bakal terjadi, berdasarkan itu, mereka lantas memborong dolar Amerika Serikat dan melepaskan baht Thailand. Akibatnya, nilai dolar meningkat. Jika Thailand mau mempertahankan kurs yang tetap, negara itu harus melakukan intervensi.

Sebenarnya, Thailand sudah intervensi cukup tinggi, namun ternyata belum cukup membantu, sehingga akhirnya dilepaskan saja. Jadi ketimbang nanti intervensi terus, lalu cadangan devisa negaranya semakin kecil, akan semakin runyam. Akhirnya Thailand melepaskan kursnya, dalam arti tidak dikendalikan, dan diserahkan pada pasar.

Karena kita ini berada pada satu kawasan, ibarat penyakit, ini merayap terus. Dari Thailand, kemudian Filipina, akhirnya sampai juga ke Indonesia. Dalam pasar uang yang sudah terintegrasi, serta didukung kecepatan informasi dan komunikasi, gejolak itu pasti merembet ke tempat lain. Jika saya ibaratkan, ini seperti ada beberapa orang yang berada dalam satu kamar. Yang satu batuk, lama-lama yang lain ketularan. Karena kondisi demikian, spekulasi lokal tergugah juga untuk bermain. Akibatnya bisa dilihat, mata uang ringgit Malaysia, peso Filipina, termasuk rupiah, mengalami penurunan juga. Di samping itu, jika rupiah tidak terdepresiasi, barang kita tidak kompetitif sebab barang Thailand, misalnya, menjadi lebih murah. Karena barang Thailand dalam valuta asing lebih murah, orang asing lebih banyak membeli ke sana. Ini berarti Thailand akan mengalami ekspor.

Meskipun menimbulkan beberapa kecemasan, ada juga keuntungan yang bisa dicatat dari depresiasi rupiah ini, yakni barang kita menjadi lebih kompetitif. Harga barang kita turun di mata orang asing, misalnya dalam dolar. Hal ini bisa mendorong ekspor. Langkah yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi gejolak rupiah ini?

Langkah awal adalah dengan mengadakan penyesuaian, yakni dengan menyesuaikan band atau batas intervensi Bank Indonesia (BI) dari 8% ke 12%. Kurs diberikan ruang fluktuasi yang lebih luas, sehingga lebih lebar spread-nya. Dengan melebarkan itu menyebabkan kemungkinan intervensi lebih kecil. Karena kalau masih dalam spread daw tidak melebihi batas atas, BI tidak perlu intervensi dan devisa utuh.

Yang terjadi seperti juga Thailand, akhirnya kurs dollar terhadap rupiah juga dilepaskan. Indonesia mencoba adjustment yang kedua, yaitu intervensi melalui forward, yaitu dengan melakukan transaksi saat ini, seolah-olah sekarang mau jual tapi mengambilnya nanti. Namun, ternyata tekanan terhadap rupiah masih gencar. Lalu dilakukan adjustment yang ketiga, yakni dengan memberhentikan transaksi Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan menaikkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Maksudnya untuk menegatkan likuiditas (*tight money policy*), supaya rupiah semakin langka sehingga orang tidak memburu rupiah untuk ditukar dengan dolar. Intinya agar spekulasi menjadi reda.

Ternyata, dengan adjustment ini tekanan terhadap rupiah masih tetap kuat. Nah, daripada cadangan devisanya terkuras, band dilepaskan saja. Dengan demikian kurs berapa pun terserah pasar. Pemerintah tidak perlu intervensi secara langsung sehingga cadangan devisanya tidak langsung.

Masalah ini, sebenarnya merupakan gejala yang umum. Negara-negara ASEAN lainnya juga mengalami hal yang sama. Nanti suatu saat nilai rupiah kembali mencari titik yang seimbang. Namun sulit diprediksi sampai berapa lama keadaan ini berlangsung. Saya kira tidak sampai setahun akan ada penyesuaian lagi sampai pada titik seimbang. Nanti pasti ada upaya, seperti Thailand yang memperoleh pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) dan lembaga lainnya sebesar, US \$ 15 miliar. Tetapi kalau IMF memberikan pinjaman, biasanya dengan menetapkan syarat-syarat, misalnya *tight money policy*, fiskalnya juga ketat, dan lain-lain. Jika nanti kita harus seperti itu, saya khawatir stagnasi dan inflasi akan terjadi.

Kalau dilihat fundamental ekonomi kita, sebenarnya cukup baik. Seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad, neraca pembayaran baik, pertumbuhan ekonomi 7,8%., inflasi terkendali, dan cadangan devisa sekitar US\$ 21 miliar. Jadi, indikator-indikator ekonomi yang prinsip itu cukup bagus.

Memang dari segi ekspor, depresiasi rupiah menguntungkan karena membuat harga ekspor akan relatif murah sehingga cukup kompetitif. Tetapi, di lain pihak, depresiasi rupiah juga berdampak negatif. Pertama, komponen impor biasanya bahan baku atau bahan pembantu industri-industri kita cukup tinggi, otomatis bisa menaikkan biaya produksi. Kedua, depresiasi berdampak pada pinjaman dalam dolar. Tentu saja, kalau dihitung dalam rupiah, pinjaman itu akan meningkat. Ketiga, untuk

jangka panjang, bisa menyebabkan inflasi. Depresiasi uang itu kecenderungannya inflasi. Memang jika dilihat dalam jangka pendek, neraca berjalan kita bisa positif. Namun dalam jangka panjang kecenderungannya adalah inflasi.

Meskipun dampak negatif tersebut cukup merisaukan namun karena indikator ekonomi kita cukup bagus depresiasi ini tidak sampai menggoncangkan perekonomian nasional kita. Oleh karena itu, sekarang BI tidak perlu memikirkan kurs lagi. Jadi yang paling penting saat ini, menurut saya, adalah bagaimana mengendalikan inflasi. Ini sudah dimulai dengan *tight money policy*, tidak melakukan transaksi SBPU dengan tujuan supaya uang tidak keluar, menaikkan suku bunga SBI untuk menyedot uang, kemudian kebijakan fiskalnya juga sangat hati-hati.

Sebelum BI melepaskan spread-nya, kita masih disibukkan memikirkan kurs. Sekarang setelah dilepas, BI tidak perlu lagi memikirkan kurs, karena sudah diserahkan pada pasar. Yang penting, tingkat inflasi. Saya kira cara ini cukup efektif mengingat fundamental kita cukup bagus dan kebijakan kita bersifat restriktif.

Ini adalah salah satu cara mengerem inflasi, kemudian cadangan devisa tetap dipertahankan. Jadi, dengan dilepaskannya spread ini devisa aman sehingga orang merasa lebih aman.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama ini secara bertahap sudah cukup bagus. Tetapi, saya melihat, kelemahan dari kebijakan sistem free market ini bisa menyebabkan kurs fluktuatif, menjadi lebih tidak pasti. Kadang kala kondisi inilah yang mendorong terjadinya spekulasi. Sedangkan keuntungannya, cadangan devisa tidak turun, dan bank sentral hanya berkonsentrasi pada target inflasi, tidak perlu memikirkan kurs. Di samping itu, di pasar internasional, barang kita lebih kompetitif.

Akan tetapi nanti seandainya terjadi gejolak, dugaan saya adjustment, berikutnya adalah sama seperti yang dilakukan Thailand, yakni dengan bantuan IMF. Fungsi utama lembaga ini adalah mendorong agar kurs dunia tidak goncang. IMF memberikan semacam loan (pinjaman). Jadi kalau nanti devisa itu sampai terkuras, masih ada upaya untuk mengatasinya. Tapi dugaan saya, dengan kurs yang sudah free ini, para spekulan yang akan mencoba kekuatan BI ini semakin reda. Atau dengan melepaskan kurs pada pasar, dapat mengurangi kesempatan para spekulan

untuk menebak-nebak, Kerjasama perbankan ASEAN sangat diperlukan, misalnya pembentukan ASEAN FUNDS.

LANGKAH SELANJUTNYA

Menghadapi era globalisasi tahun 2020 beberapa hal masih perlu ditingkatkan agar daya saing (efisiensi), baik efisiensi biaya, alokasi kredit dan likuiditas lebih tinggi. Salah satu aspek adalah pengawasan yang baik meliputi personil maupun instrumennya. Disamping itu teknologi dan sistem informasi perbankan perlu dikembangkan, mengingat era globalisasi adalah era teknologi dan informasi. Perbankan akan mengarah ke elektronik banking.

Persaingan yang semakin tajam menuntut restrukturisasi perbankan, efisiensi yang tinggi transparancy dan daya saing perlu ditingkatkan. Dalam alam seperti ini peranan sektor moneter swasta akan semakin membesar. Privatisasi perbankan akan semakin dituntut meskipun dalam persaingan akan selalu diikuti dengan merger, namun tidak akan mengarah pada konsentrasi perbankan. Hal ini mengingat adanya ketentuan untuk merger bahwa assets bank yang tidak boleh melebihi 20% dari assets total/seluruh bank, sehingga paling sedikit di Indonesia ada 5 bank. Hal ini diperkuat juga oleh satu hasil penelitian bahwa asset bank tidak secara signifikan mempengaruhi return, sehingga tidak ada dorongan kuat suatu bank memperbesar assetnya. Organisasi bank akan cenderung ramping tetapi berotot.

Di bidang alokasi kredit nampaknya tuntutan pemerataan akan semakin membesar. Memang hal ini bagi bank kadangkala merupakan dilema, yang dapat terjadi kemungkinan untuk mengarah pada spesialisasi yang lebih dalam. Bank bukan lagi supermarket yang melayani segala kebutuhan akan tetapi cenderung menekankan pada satu aspek, corporate atau retail banking (core business). Selama ini masih terlihat adanya alokasi kredit yang terarah ke sektor yang returnnya tidak tinggi sehingga masih cukup banyak kredit yang bermasalah. Untuk masa mendatang kehati-hatian sangat diperlukan. Pengawasan oleh Bank Indonesia perlu semakin ditingkatkan dengan sistem informasi yang baik serta tenaga auditor yang memadai.

Menghadapi abad 21 sektor perbankan harus sound. Untuk itu reformasi yang telah dirintis sejak 1983 terus dilanjutkan.

Pelaksanaan ketentuan perbankan diupayakan dan selalu dievaluasi. Akhirnya, kunci upaya untuk menghadapi era globalisasi 2020 adalah pengembangan sumber daya manusia yang mampu menguasai IPTEK dan mempunyai visi ke depan serta menjunjung tinggi moral dan etika bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Ohmai Kinichi, "*Borderless Asia*", The Asia Manager, Vol IX No.2, May 1996

Grubel, H.C., "*International Economics*", Illinois, Richard D. Irwin, 1993

World Bank, "*Indonesia Dimension of Growth, Report No. 15383*", May 7th 1996